
Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Januari-2020/4
Judul	: TARGET DBH MIGAS TERJUN BEBAS, HENTIKAN PEMBOROSAN ANGGARAN	Tanggal	: 26 April 2021
Sub Judul	: HENTIKAN PEMBOROSAN ANGGARAN	Tahun	: 2021
		Penulis	: *FITRA RIAU*

**TARGET DBH MIGAS TERJUN BEBAS,
HENTIKAN PEMBOROSAN ANGGARAN**

Fitra Riau - Tahun 2021 dapat disebut tahun yang buruk bagi daerah-daerah penghasil sumberdaya Minyak dan gas bumi. Khususnya daerah-daerah penghasil Migas di Riau. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tentang transfer keuangan pemerintah daerah dan dana desa untuk tahun 2021, DBH Migas untuk daerah-daerah di Riau (12 Kab/kota dan Provinsi) hanya ditargetkan Rp. 1,7 Triliun (Tepatnya Rp. 1.730,515,883,000).

Triono hadi mengatakan,Target Penerimaan transfer DBH Migas ke Riau itu merupakan target terendah sepanjang 10 tahun terakhir ini. DBH Migas yang ditargetkan diterima tahun 2021 ini hanya 35% nya dari target yang ditetapkan tahun 2020 (belum ada data realisasi). dan hanya 32% nya dari realisasi tahun 2019. Artinya potensi DBH Migas yang diterima oleh pemerintah se Riau tahun 2021 ini jauh bekurang dari tahun sebelumnya yang belum diketahui jelas apa yang menjadi penyebabnya.

Provinsi Riau Riau, yang mendapatkan bagian 3,5% dari hasil migas Kabupaten se Riau, tahun 2021 hanya ditargetkan Rp. 346,1 Milyar. angka itu jauh dari taget tahun 2020 sebesar Rp. 1,28 Triliun dan realiasi tahun 2019 sebesar Rp. 830 Milyar. Kondisi yang sama untuk daerah penghasil migas besar di Riau, seperti Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hilir. Tahun 2021 target dbh migas yang akan diterima oleh daerah-daerah itu hanya sepertiga dari realisasi dbh migas tahun 2019 dan target tahun 2020 maka kondisi ini akan semakin memperkecil kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi maupun kabupaten Kota penghasil Migas. " Ungkap Triono Hadi" (Koordinator FITRA)

Kabupaten di Riau rata-rata menggantungkan pendapatan daerah yang sangat tinggi kepada pendapatan transfer dari pusat. Salah satunya adalah dana bagi hasil kelola sumberdaya alam. Selain bagi hasil pajak, DAU serta DAK. Kabupaten/kota di Riau reeata 89% dari penerimaan daerahnya berasal dari dana tansfer pusat maupun transfer provinsi (bagi hasil dan perimbangan). sementara pengaruh Pendapatan Asli daerah masih sangat kecil di tingkat kabupaten/kota.

Apalagi,PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari pajak retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD merupakan cerminan dari bagaimana kondisi ekonomi di daerah itu. semakin kecil PAD maka menunjukkan tingkat ekonomi didaerah masih belum baik. Ekonomi dapat dilihat dari aspek pajak dan retribusi daerah untuk skala yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.

Hentikan Pemborosan

Pemerintah daerah juga masih menunjukkan perilaku boros, tidak efisien dalam membelanjakan uang APBD. Seperti Provinsi Riau, rerata setiap tahun lebih dari 24,6% APBD digunakan untuk belanja pegawai, 13% untuk belanja operasional rutin pemerintah melalui dinas-dinas. Sementara untuk belanja langsung yang berdampak terhadap masyarakat sangat kecil.

Taufik mengatakan bahwa,diProvinsi Riau, tahun 2021 adalah tahun dengan alokasi anggaran program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terkecil dalam lima tahun terakhir. Sementara lainnya, pemerintah provinsi Riau masih saja menganggarkan untuk program infratraktur yang tidak prioritas dan bukan menjadi kewenangannya. seperti Program pembangunan gedung korem yang seharusnya menjadi kewenangan pusat. Sebelumnya untuk kantor Polda Riau, Kejaksaan Riau juga dibangun dan dibebankan pada APBD Riau.

Fitra Riau mencatat, untuk ketiga bangunan tersebut dialokasikan anggaran mencapai Rp. 521 Milyar. Praktek boros anggaran juga terjadi di anggaran perjalanan dinas. Provinsi Riau setiap tahun menganggarkan anggaran perjalanan dinas rata-rata Rp.405 Milyar setiap tahun. Perjalanan dinas yang paling besar ada di DPRD Riau.

Selain itu, Pemerintah daerah juga masih cenderung boros dengan belanja rutin yang digunakan untuk penunjang pelaksanaan program. (Belanja operasi). Setiap tahun rerata 15% dari belanja langsung pemerintah daerah yang dikelola oleh OPD untuk belanja rutin. seperti ATK, perbaikan gedung kantor, pemeliharaan sarana pemerintah, termasuk didalamnya pakaian dinas pemerintah yang menghabiskan belanja sebesar Rp 9,2 Miliar "Ungkap Taufik" (Manager Advokasi FITRA)

Triono, "Menambahkan" Sulit untuk melihat efektifitas dari dana bagi hasil migas ini digunakan oleh pemerintah daerah. Karena dalam perencanaan anggaran, tidak ada earmarking belanja daerah yang berasal dari dbh migas. Sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaan dari dana dbh migas itu. Karena mekanisme bercampur baur, maka sangat mungkin belanja -belanja yang boros dan tidak efektif itu juga berasal dari pendapatan dbh migas.

Dengan demikian, FITRA mendesak Pemerintah daerah (Provinsi Riau dan Kabupaten.Kota) untuk saat nya berbenah dari sisi kebijakan anggaran. Komoditi priomadona (migas) sudah tidak lagi menjadi sumber keuangan untuk bergantung, apalagi situasi 2021 ini adalah cerminan dari untuk tahun-tahun yang akan datang.

Seharusnya pemerintah daerah menjalankan prinsip efektif dan efisien dalam pembiayaan program-program. Pemerintah, dengan memperhatikan selekti mungkin dalam merancang program-program. Terutama pada penyusunan Program prioritas karena program perioritas tersebut merupakan program yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. seperti untuk Pemenuhan layanan dasar, peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sehingga Program - program yang tidak jelas arahnya, apalagi yang bukan kewenangannya. Gubernur dan Bupati harus tegas untuk meniadakannya. "Tutup Triono hadi" **

Contac Person :

Triono Hadi : 0853-7636-8128

Taufik : 0853-6343-0444